



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

## 2019



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA**

Telp. (0274) 514448, 515865, 515866, 562682

E Mail: [dukcapil@jogjakota.go.id](mailto:dukcapil@jogjakota.go.id).

WEB SITE: [www.kependuudkan.jogjakota.go.id](http://www.kependuudkan.jogjakota.go.id)

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 dan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan. LKIP Tahun 2018 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing goverment*) sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Akhirnya laporan evaluasi kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari bahwa masih dijumpai tantangan dan masalah dalam pencapaian target kinerja, namun demikian optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Yogyakarta

TTD

H. Sisruwadi, SH., M.Kn.

## BAB 1

# PENDAHULUAN

### ***Bab 1 Berisi :***

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

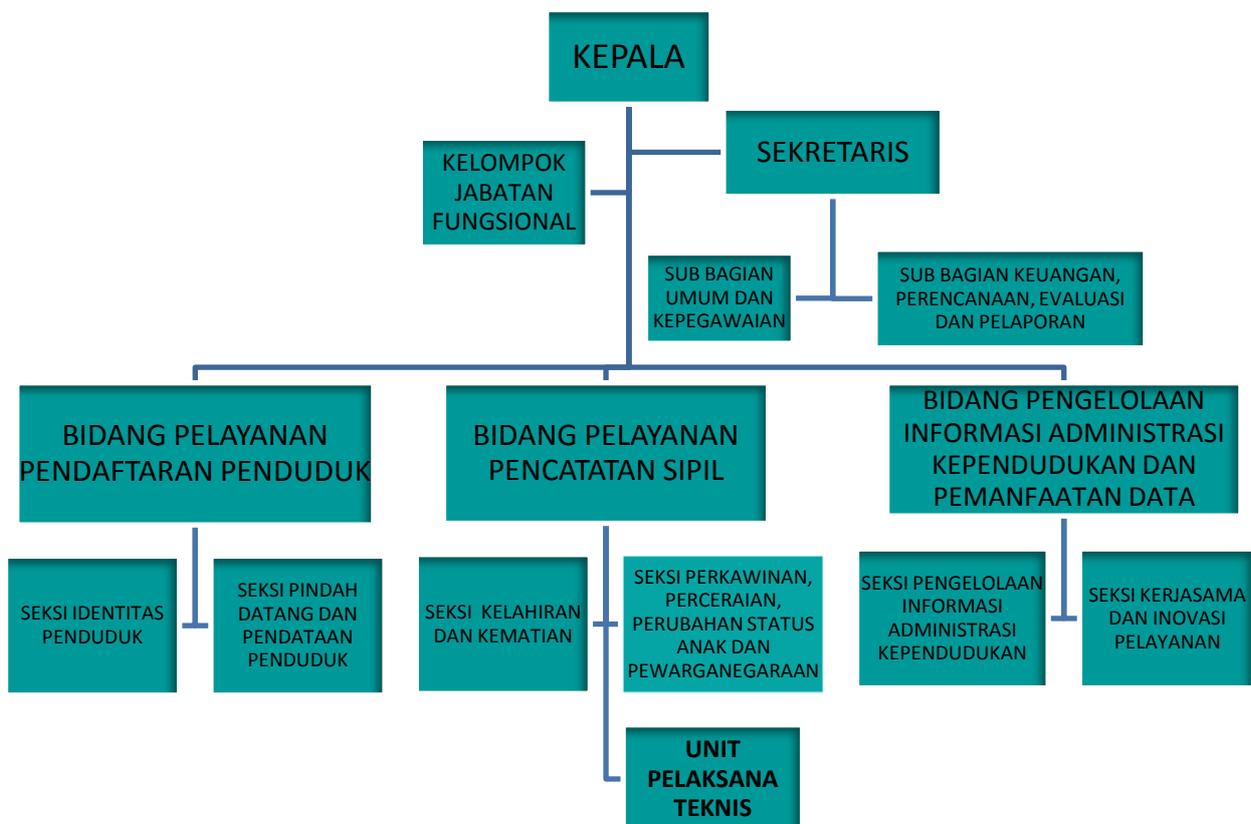
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENACATATAN SIPIL**  
**KOTA YOGYAKARTA**



## 1.2 Fungsi dan Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun landasan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

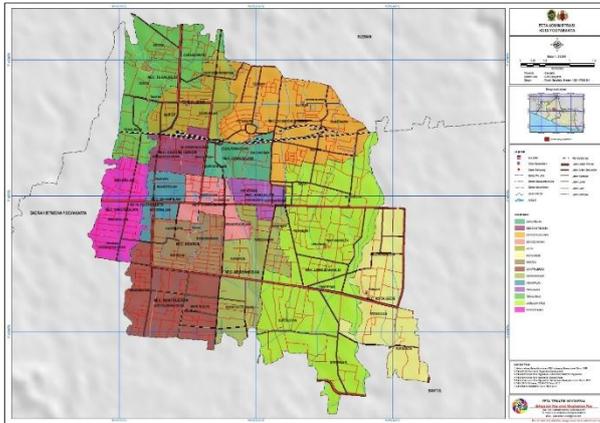
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak terkait
2. Pelayanan kependudukan go digital
3. Pemanfaatan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan

4. Dinamika penduduk Kota Yogyakarta berkaitan dengan karakteristik kota yang bersifat “terbuka dan tempat tujuan untuk berbagai kepentingan”



Gambar 1.2 Peta Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 km<sup>2</sup> berpenduduk 416.049 jiwa pada tahun 2019 merupakan kota yang bersifat “terbuka dan memiliki berbagai potensi kewilayahan yang menarik” sehingga tempat tujuan migrasi penduduk dengan berbagai kepentingan seperti bekerja, menempuh pendidikan dan lain-lain.

Dinamika pergerakan penduduk yang cukup tinggi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

#### 1.4 Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.



Gambar 1.3. Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

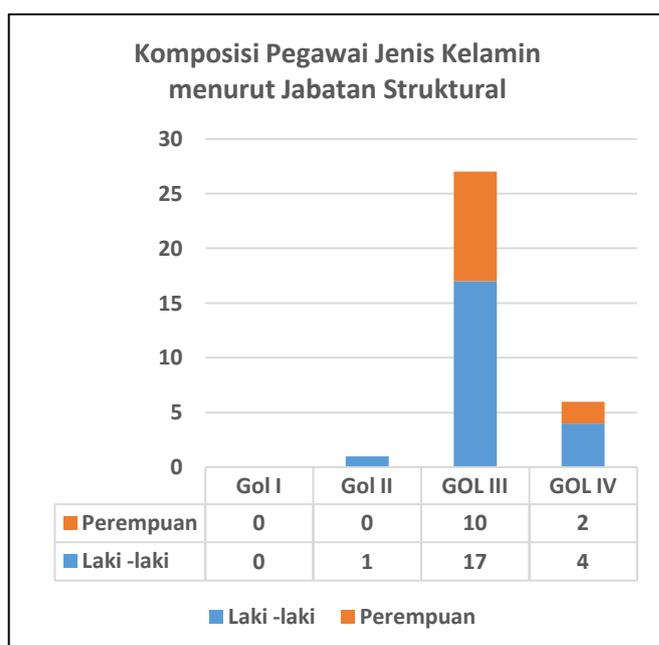
Pada akhir tahun 2019 terdapat 40 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 34 orang dan Tenaga Bantuan (Naban) sebanyak 6 orang. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 70% dan sisanya sebanyak 30% merupakan pegawai perempuan. Pegawai Laki laki 27 orang, dan wanita sebanyak 12 orang.

Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 10 orang pejabat struktural dan 22 orang staf fungsional umum, 2 orang fungsional tertentu dan 6 tenaga bantuan dengan komposisi 25% pejabat struktural dan 75% non struktural.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2019

No	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
1	Kepala	1 orang	Ada
2	Sekretaris	1 orang	Ada
3	Kepala Bidang	2 orang	
	• Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Ada
	• Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		Tidak Ada
	• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		Ada
4	Kepala Sub Bagian	2 orang	
	• Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		Ada
	• Kepala Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Tidak Ada
5	Kepala Seksi	5 orang	
	• Kepala Seksi Identitas penduduk		Tidak Ada
	• Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk		Ada
	• Kepala Seksi Pelayanan Kelahiran dan Kematian		Ada
	• Kepala Seksi Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan		Ada
	• Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Ada
	• Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan		Ada
6	Staf Fungsional Umum	22 orang	Ada
7	Staf Fungsional Tertentu	2 orang	Ada
8	Tenaga Bantuan (Naban)	6 orang	Ada

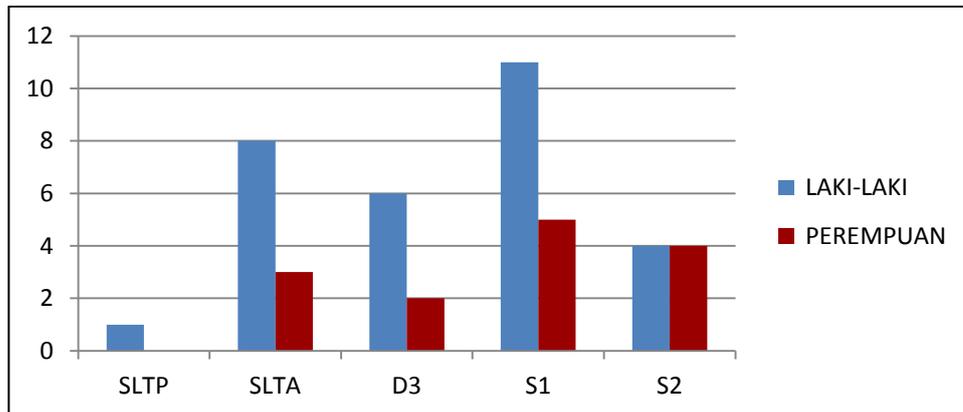
Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 2018



Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih banyak menduduki jabatan struktural dibanding perempuan. Selain itu pada tingkat eselon yang semakin tinggi menunjukkan bahwa komposisi perempuan yang menduduki jabatan semakin mengecil. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan karir perempuan sehingga semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis untuk berperan lebih luas dalam pengambilan kebijakan

Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural Tahun 2019

Bila pegawai dipilah menurut pendidikan dan jenis kelamin menunjukkan bahwa pendidikan SLTP sampai dengan pendidikan tinggi S1 masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi S2 jumlah antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang.



Gambar 1.5. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Sedangkan apabila data dipilah menurut pendidikan pada tiap golongan menunjukkan bahwa PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian terbesar adalah golongan III dengan pendidikan S1 sebanyak 45,16% Rincian detail pegawai menurut pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Per 31 Desember 2019

PENDIDIKAN	Naban	Gol I	Gol II	GOL III	GOL IV	Jumlah
SLTP	1	0	0	0	0	1
SLTA	3	0	1	8	0	11
DIPLOMA	1	0	0	7	0	8
SARJANA	1	0	0	14	1	16
PASCA SARJANA	0	0	0	2	6	8
Jumlah	6	0	1	31	7	44

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 2019

### 1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel1.3 Daftar Jenis Barang dan KondisinyaPer 31 Desember 2019

No	Jenis barang	Kondis	Jumlah
1	AC	Baik	40
2	Adapter/Adaptor	Baik	21
3	Alat baca KTP El	Baik	20
4	Almari besi/kayu	Baik	7
5	buku bacaan/buku perpustakaan	Baik	63
6	Camera	Baik	40
7	Dehumedifier	Baik	1
8	Dekstop	Baik	4
9	Dispenser	Baik	4
10	Exhaouse Fan	Baik	5
11	Filling cabinet	Baik	33
12	Fingerprint Scanner	Baik	10
13	Genzet	Baik	16
14	Hardisk eksternal	Baik	6
15	Irust Scanner	Baik	10
16	Kipas angin	Baik	16
17	Komputer	Baik	111
18	Kursi	Baik	69
19	LamiPacker	Baik	14
20	Lap top	Baik	10
21	LCD Dilplay/projektor	Baik	2
22	LED TV	Baik	2
23	meja	Baik	30
24	Mesin tik	Baik	10
25	Mesin Laminating	Baik	50
26	Mesin penghisap debu	Baik	1
27	MESIN PRESENSI	Baik	3
28	Minibus	Baik	3
29	Monitor 26	Baik	26
30	Note book/tablet	Baik	8
31	PC	Baik	31
32	Pesawat telepon	Baik	9
33	Pompa air	Baik	2
34	Sound System	Baik	5
35	Printer 92	Baik	92

36	Printer jet	Baik	86
37	Printer KTP el	Baik	2
38	Printer dot matrik	Baik	42
39	Printer monokrom	Baik	3
40	Printer thermal	Baik	6
41	Printer multifungsi	Baik	1
42	Rak besi	Baik	51
43	Rak kayu	Baik	26
44	Sarana LAN	Baik	15
45	Scanner	Baik	48
46	Sepeda	Baik	1
47	Sepeda motor	Baik	23
48	Server	Baik	6
49	Signatur pas	Baik	11
50	Smart phone	Baik	1
51	Smart card reader	Baik	81
52	Stabilizer	Baik	17
53	TV	Baik	6
54	Thermohydrometer	Baik	2
55	UPS	Baik	94
56	Whiteboard	Baik	5
57	Wireless	Baik	23

Sumber: Buku Inventaris Barang, 2019

Dari daftar inventaris asset yang ada tercatat masih dalam keadaan baik, meskipun sebagian diantaranya telah mengalami kerusakan, hal ini disebabkan belum selesainya pendataan kondisi alat pada tahun 2019. Sarana prasarana yang ada sebagian besar digunakan untuk :

1. Pendukung operasional administrasi perkantoran
2. Pendukung operasional layanan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :
  - Counter Layanan
  - Nomor Antrian Elektronik
  - Ruang Laktasi
  - Kids Zone (Ruang bermain Anak)
  - Fasilitas Difabel
  - Fasilitas Informasi dan Pengaduan
  - Ruang Kearsipan
  - Pelayanan Keliling
  - Dan lain-lain



Gambar 1.6 Sarana Prasarana Pelayanan

Dari kondisi sarana prasarana yang ada saat ini diperlukan penambahan jumlah jumlahnya mengingat :

- adanya resiko kerusakan alat karena factor usia pemakaian
- penghapusan sarana prasarana
- penambahan kegiatan yang berdampak pada penambahan jumlah sarana prasarana seperti perangkat computer dan perangkat rekam KTP EL
- penambahan jumlah dokumen pelayanan

Adapun jumlah ideal peralatan sarana prasarana adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Daftar Jenis dan Jumlah Barang Ideal

No	Jenis barang	Jumlah Saat ini	Jumlah Ideal	Keterangan
1	AC	40	44	Penambahan untuk melengkapi pelayanan di 14 kecamatan dan dinas
2	Adapter/Adaptor	21	21	
3	Alat baca KTP El	20	65	Penambahan untuk melengkapi pelayanan di 14 kecamatan dan dinas
4	Almari besi/kayu	27	35	Penambahan untuk melengkapi ruang arsip register
5	buku bacaan/buku perpustakaan	63	63	
6	Camera	40	40	
7	Dehumedifier	1	2	

8	Dekstop	4	4	
9	Dispenser	4	4	
10	Exhaouse Fan	5	7	Penambahan untuk melengkapi pelayanan dinas
11	Filling cabinet	33	33	
12	Fingerprint Scanner	10	18	Penambahan untuk melengkapi pelayanan di 14 kecamatan dan dinas
13	Genzet	16	16	
14	Hardisk eksternal	6	6	
15	Irist Scanner	10	18	Penambahan untuk melengkapi pelayanan di 14 kecamatan dan dinas
16	Kipas angin	16	20	
17	Komputer	111	111	
18	Kursi	69	69	
19	LamiPacker	14	14	
20	Lap top	10	15	Penambahan untuk melengkapi pelayanan di ruang publik
21	LCD Dilplay/proyektor	2	2	
22	LED TV	2	2	
23	meja	30	30	
24	Mesin tik	10	10	
25	Mesin Laminating	50	50	
26	Mesin penghisap debu	1	1	
27	Mesin press	3	3	
28	Minibus	3	3	
29	Monitor 2	26	26	
30	Note book/tablet	8	8	
31	PC	31	31	
32	Pesawat telepon	9	9	
33	Pompa air	2	2	
34	Sound System	5	5	
35	Printer 92	92	92	
36	Printer jet	86	86	
37	Printer KTP el	2	2	
38	Printer dot matrik	42	42	
39	Printer monokrom	3	3	
40	Printer thermal	6	16	
41	Printer mutifungsion	1	4	Penambahan untuk melengkapi pelayanan dinas dan ruang publik
42	Rak besi	51	51	
43	Rak kayu	26	26	Penambahan untuk melengkapi ruang arsip

44	Sarana LAN	15	15	
45	Scanner	48	48	
46	Sepeda	1	1	
47	Sepeda motor	23	23	
48	Server	6	6	
49	Signatur pas	11	11	
50	Smart phone	1	1	
51	Smart card reader	81	81	
52	Stabilizer	17	17	
53	TV	6	6	
54	Thermohydrometer	2	2	
55	UPS	94	94	
56	Whiteboard	5	5	
57	Wireless	23	23	

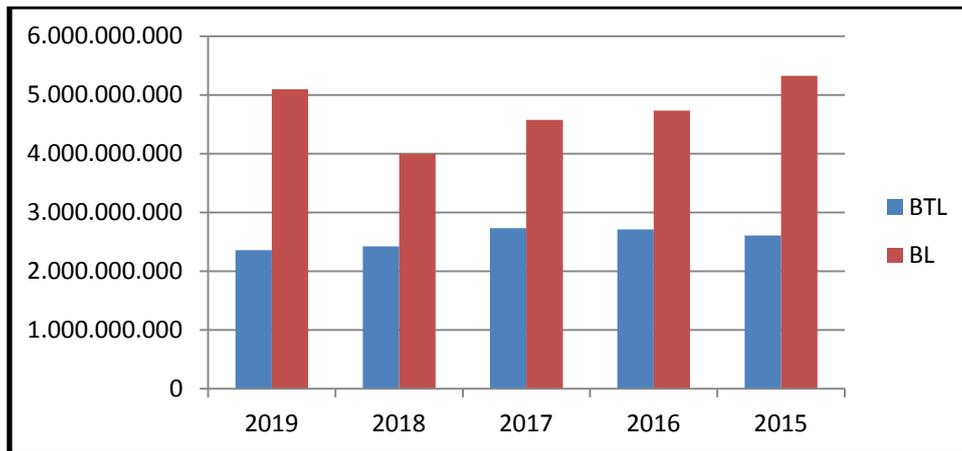
## 1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah tahun 2019 sebesar Rp.7.454.924.133,- dengan perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung 68,37 % dibanding 31,63 %

Tabel 1.5 Jumlah Alokasi Anggaran Belanja

Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Anggaran Tahun 2015 (Rp)
Belanja Tidak Langsung (BTL)	2.358.339.134	2,423.245.356	2,734.348.514	2.711.552.693	2.608.300.570
Belanja Langsung (BL)	5.096.585.000	3.996.592.050	4,572.677.971	4.732.011.520	5.322.016.730
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>7.454.924.134</b>	<b>6.419.837.406</b>	<b>7,307.026.485</b>	<b>7.443.564.213</b>	<b>7.930.317.300</b>

Sumber: DPPA, 2019



Gambar 1.7 Jumlah Alokasi Anggaran Belanja Th. 2015 - 2019

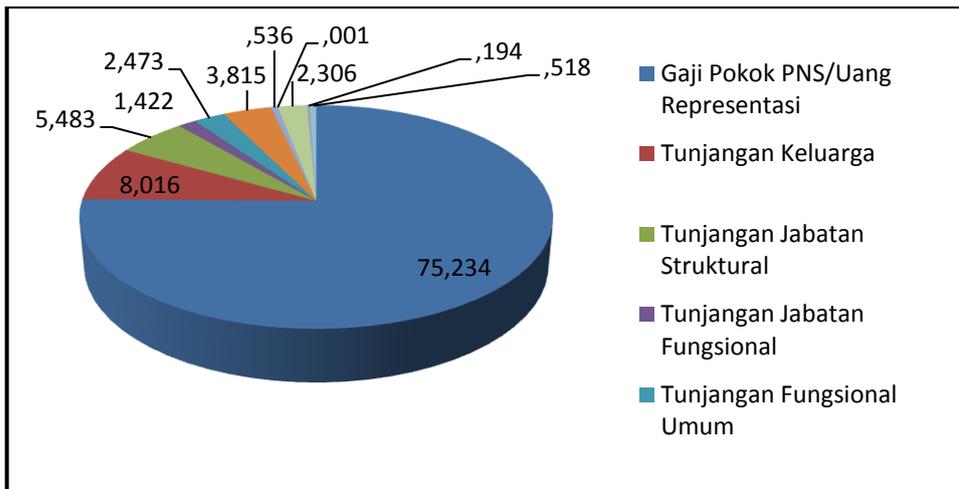
### Belanja Tidak Langsung

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 besaran anggaran belanja tidak langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cenderung fluktuatif mengikuti kebutuhan Perangkat Daerah dan peraturan serta kebijakan yang berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta. Rincian alokasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.6 Anggaran Belanja Tidak langsung Th. 2015-2019

No	Rincian	Anggaran				
		2.019	2018	2017	2016	2015
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.774.303.322	1.845.394.090	2.094.072.540	2.094.072.540	1.994.936.230
2	Tunjangan Keluarga	189.036.376	189.575.573	194.851.874	194.851.874	196.614.069
3	Tunjangan Jabatan Struktural	129.319.750	128.045.750	151.438.625	151.438.625	155.169.625
4	Tunjangan Jabatan Fungsional	33.525.000	15.498.000	22.500.000		
5	Tunjangan Fungsional Umum	58.332.750	66.368.750	71.355.375	71.355.375	78.807.125
6	Tunjangan Beras	89.967.366	93.530.430	111.345.750	111.345.750	128.215.421
7	Tunjangan PPh/ Khusus	12.635.487	11.957.940	19.816.790	29.213.270	54.517.438
8	Pembulatan Gaji	27.888	25.901	31.756	31.756	40.662
9	Iuran Asuransi Kesehatan	54.387.341	52.060.352	59.243.245		
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.575.979				
11	Iuran Jaminan Kematian	12.227.875	20.788.570	9.692.559		
	<b>Jumlah</b>	<b>2.358.367.022</b>	<b>4.423.245.356</b>	<b>2.734.348.514</b>	<b>2.711.552.693</b>	<b>2.608.300.507</b>

Distribusi persentase terbesar alokasi anggaran belanja tidak langsung adalah untuk membayar gaji pegawai seperti digambarkan dalam grafik sebagai berikut ini:



Gambar 1.8 Komposisi Anggaran Belanja Tidak Langsung 2019

### Belanja Langsung

Komposisi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 fluktuatif seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

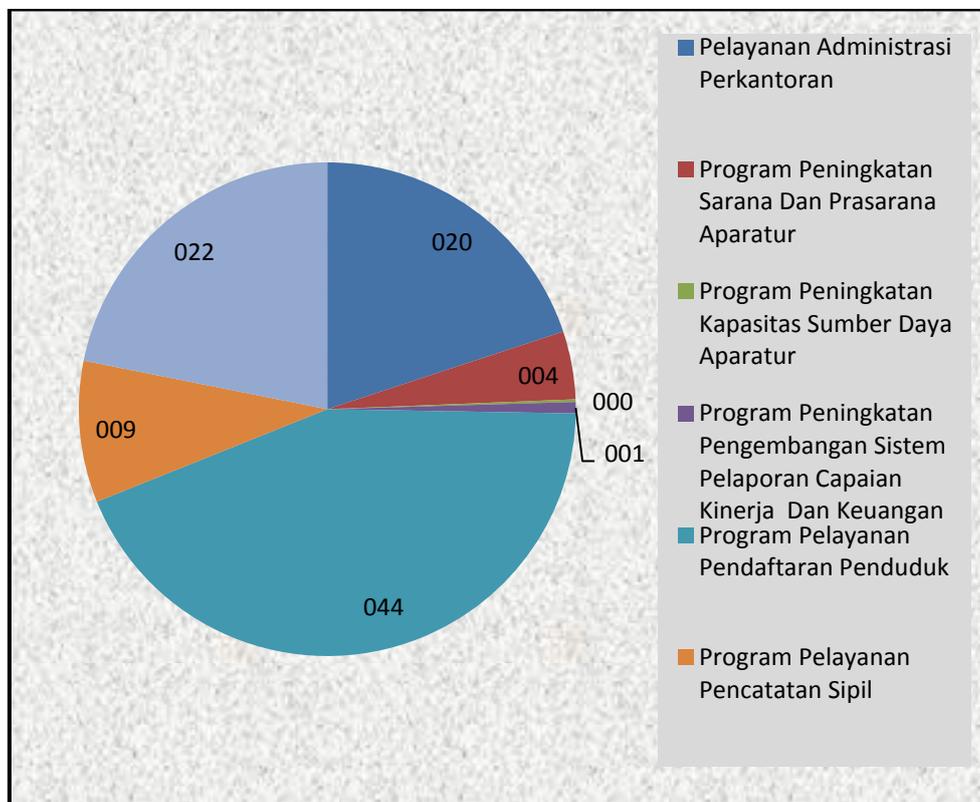
Tabel 1.7 Anggaran Belanja langsung Th. 2019

No	Program / Kegiatan	Anggaran
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.014.450.000</b>
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	223.914.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan kantor	790.536.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>227.102.000</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan kantor	67.000.000
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional	160.102.000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>8.750.000</b>
	Bintek Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	8.750.000
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>37.696.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	37.696.000
<b>5</b>	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>2.222.523.000</b>
	Pelayanan Identitas Penduduk	1.567.925.000
	Pelayanan Pindah datang dan pendataan Penduduk	654.598.000
<b>6</b>	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>472.724.000</b>

	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	401.214.000
	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	71.510.000
7	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	1.113.340.000
	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	181.255.000
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	932.085.000
	<b>Jumlah Anggaran Belanja Langsung</b>	<b>5.096.585.000</b>

Sumber: DPPA, 2019

Berikut grafik untuk belanja langsung Tahun 2019



Gambar 1.9 Komposisi Anggaran Belanja Langsung Th 2019

### 1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematis penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematisa penulisan LKjIP.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

## BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## LAMPIRAN

## BAB 2

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### *Bab 2 Berisi :*

- 1. Perencanaan Strategis*
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019*
- 3. Rencana Anggaran Tahun 2019*
- 4. Instrumen Pendukung*

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022

#### **2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2017 – 2022 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Yogyakarta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah daerah pada Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat dengan indikator capaian sasaran Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah.

### 2.1.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

#### Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2017-2022 adalah

“Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat”

#### Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil	89,75%	96,75%	97,38%	98,00%	98,63%	99,25%

Sumber: Review RENSTRA Dindukcapil, 2018

### 2.1.3 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2019 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Pelayanan Identitas Penduduk
		Pelayanan Pindah datang dan pendataan Penduduk
	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Pelayanan Kelahiran dan Kematian
		Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	Persen	97,38

Selain melaksanakan perjanjian kinerja organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga melaksanakan Perjanjian Kinerja Strategis untuk tingkat Kota Yogyakarta yaitu :

1. Data kependudukan yang dapat dijadikan database yang bersifat dinamis
2. Memunculkan inovasi baru

3. Berupaya meraih dan mempertahankan penghargaan nasional sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mengutamakan rekanan yang memiliki NPWP Kota Yogyakarta
5. Memberi penghargaan bagi kelurahan dan kecamatan yang terbaik administrasi kependudukannya.

Pada tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak melaksanakan Perubahan target Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perubahan hanya pada penambahan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja berupa pengadaan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan.

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 7.181.533.875,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.343.977.737,- dan Belanja Langsung Rp 4.837.554.138,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp. 7.454.924.134,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.358.339.134,- dan Belanja Langsung Rp 5.096.585.000,-

#### 2.3.1 Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2019

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.358.339.134,-	31,63%
Belanja Langsung	Rp. 5.096.585.000,-	68,37%
Jumlah	Rp. 7.454.924.134,-	100 %

#### 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Rp.7.454.924.134,-	100 %	-

## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

### Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2019*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2019.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah:



### SASARAN

Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat

Sasaran yang akan dicapai Indikator kinerja sasaran dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	97,38%	92,79 %	95,28%

Pada tahun 2019, indikator indeks tertib administrasi kependudukan mencapai 92,79 persen dari target sebesar 97,38 persen artinya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai indikator tertib adminduk baru tercapai 92,79 persen dari warga Kota Yogyakarta atau baru tercapai 95,28 dari yang ditargetkan. Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian atas tertib administrasi kependudukan tahun 2019 termasuk dalam kriteria sangat baik.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan evaluasi pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Sasaran tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat diukur dengan indikator Indeks tertib administrasi kependudukan dengan formula indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN	RINCIAN FORMULA INDIKATOR SASARAN	
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP dan Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga
			penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kelahiran dan Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kematian

Adapun dari masing-masing formula indikator sasaran dibuat rumus pengukurannya. Rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing formula indikator serta tingkat capaian terhadap target dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.4 Perhitungan Kinerja berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Tahun 2019

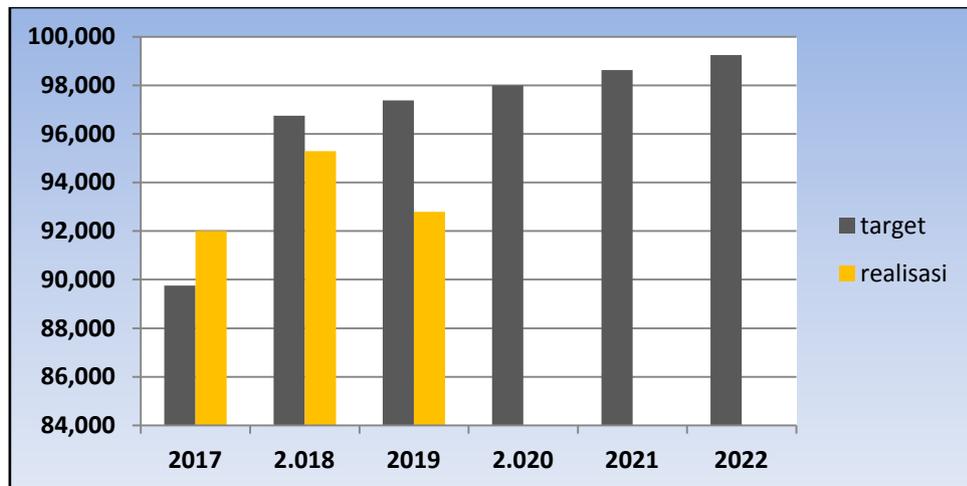
No	Nama Indikator dan Target 2018	Rumus Pengukuran	Perhitungan Capaian	Capaian	Tingkat capaian terhadap target 2019
1	Persentase penduduk ber KTP	$= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{JumlahWajib KTP}} \times 100\%$	$\frac{308.569}{314.839} \times 100\% = 99,07\%$		50 % x 99,54 + 50% x 86,04 =92,79%
2	Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga	$= \frac{\text{Jumlah KK yang dimiliki/diterbitkan}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$	$\frac{138.430}{138.430} \times 100\% = 100\%$	$\frac{99,07+100}{2} = 99,54$	
3	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kelahiran	$= \frac{\sum \text{Kutipan Kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kelahiran Terjadi}} \left( \frac{U_m}{T_d} \right)$	$\frac{3.958}{4.536} \times 100\% = 87,26\%$		
4	Persentase kepemilikan dokumen kutipan akta kematian	$= \frac{\sum \text{Kutipan Kematian yang diterbitkan (Umum)}}{\text{Jumlah Kematian Terjadi}}$	$\frac{2.700}{3.183} \times 100\% = 84,83\%$	$\frac{87,26+84,83}{2} = 86,04$	

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa tertib administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta mencapai 92,79 % hal itu ditinjau dari persentase kepemilikan KK dan KTP penduduk kota Yogyakarta dan penerbitan akta kelahiran bagi penduduk yang dilahirkan serta kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia. Bila capaian tersebut dibandingkan dengan target yang harus dicapai maka persentase capaian 95,28 % atau kurang dari 100% artinya capaian tertib administrasi kependudukan kurang berhasil meskipun tingkat capaiannya sangat baik seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Indikator Sasaran	Realisasi	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d th. 2019 terhadap target 2022 (%)
	2018	Target	Realisasi	%		
Indeks tertib administrasi kependudukan	99,24 %	97,38	92,79	95,28	99,25%	93,49

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2019 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka baru terapai 93,49 persen dari target sebesar 99,25 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan target.



Grafik : Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran dibanding Target

Selain kepemilikan dokumen kependudukan terdapat indikator tambahan terkait pemanfaatan data kependudukan yaitu persentase pemanfaatan data penduduk bagi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dengan realisasi tahun 2019 sebagai berikut :

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Jumlah OPD/Unit kerja berkerja sama pemanfaatan data dibagi Jumlah OPD/Unit di lingkungan Pemkot Yogyakarta X 100%	$\frac{82}{95} \times 100 \% = 86,32$

Bila Capaian indikator kinerja dilihat per program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Program	Indikator Program	Capaian 2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d th. 2019 terhadap target 2022 (%)
		Target %	Realisasi %	%		
Program Pelayanan Pendaftaran	Persentase penduduk yang memiliki dokumen	99,75	99,54	99,78	99,75	99,78

Target capaian kinerja Program Pelayanan pendaftaran penduduk dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2019 adalah sebesar 99,75% terealisasi sebesar 99,54% yang berarti target kinerja program tercapai 99,78% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **sangat baik**.

Adapun capaian indikator utama penerbitan akta kelahiran dan akta kematian menghasilkan pengukuran indikator kinerja program ke dua yaitu Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil yang dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Program	Indikator Program	Capaian 2019			Target Akhir Renstra (2022) %	Capaian s/d th. 2019 terhadap target 2022 (%)
		Target %	Realisasi %	%		
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	95,00	86,04	90,56	98,75	87,13

Target capaian kinerja Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil pada tahun 2019 adalah sebesar 95,00% terealisasi sebesar 86,04% yang berarti target kinerja program tercapai 90,56% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **sangat baik**.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Program	Indikator Program	Capaian 2019			Target Akhir Renstra (2022) %	Capaian s/d th. 2019 terhadap target 2022 (%)
		Target %	Realisasi %	%		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase pemanfaatan data	70 %	86,32%	123,31	100 %	86,32%

Target capaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan indikator Persentase pemanfaatan data pada tahun 2019 adalah sebesar 70,00% terealisasi sebesar 86,32% yang berarti target kinerja program tercapai 123,31% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **sangat baik**.

#### Analisis Keberhasilan pencapaian sasaran

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

#### Faktor penghambat :

1. Adanya penduduk Kota Yogyakarta yang tinggal di luar Kota Yogyakarta bahkan di luar pulau Jawa dan di Luar Negeri sehingga yang tidak bisa hadir untuk melaksanakan rekam KTP El.
  - Berdasarkan kebijakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri seharusnya penduduk yang tinggal di luar domisilinya dapat melaksanakan rekam KTP El di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat atau bagi yang tinggal di Luar Negeri dapat melakukan perekaman KTP El di Kedutaan setempat. Namun kendala yang sering terjadi antara lain :
    - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, belum membuka pelayanan rekam luar daerah
    - Penduduk yang tinggal di luar domisili tidak mengetahui kalau bisa melakukan perekaman KTP El di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/terdekat
    - Penduduk yang tinggal di luar Negeri tidak mengetahui kalau bisa melakukan perekaman KTP El di Kedutaan setempat.
2. Adanya warga Kota Yogyakarta yang melahirkan di Rumah Sakit yang belum bekerjasama dalam program percepatan 3 in 1 akta kematian dan Rumah sakit di luar Kota Yogyakarta
3. Adanya warga Kota Yogyakarta tidak membuat akta namun cukup membuat surat keterangan kelahiran atau surat keterangan kematian dari kelurahan.

### **Faktor penunjang keberhasilan :**

1. Telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk melalui upaya:
  - Percepatan layanan dengan jemput bola dan operasional mobil keliling di kelurahan, sekolah, panti-panti, lembaga masyarakat tempat publik seperti mall, dan bahkan layanan dari rumah ke rumah untuk masyarakat penyandang keterbatasan fisik, difabel dan sakit.
  - Pendekatan layanan dengan penerbitan dokumen kependudukan di kecamatan bahkan masyarakat dapat memilih pelayanan di kecamatan manapun yang paling dekat
  - Pendekatan sekaligus percepatan layanan dengan pelayanan paket 3 in 1 akte kelahiran (Akte Kelahiran KK, KIA) dengan pengambilan di rumah sakit tempat di lahirkan. Tahun 2019 sudah terdapat 14 RS yang bekerjasama melaksanakan program dimaksud.
  - Pelayanan 3 in 1 akte kematian (Akta Kematian, KK, KTP EI) dimana program ini dicetak dengan cepat untuk diserahkan pada saat upacara pemakaman. Untuk tahun 2019 program ini merupakan program rintisan baru berjalan 2 kelurahan.
2. Dilaksanakan beberapa inovasi layanan
3. Dilaksanakan program peningkatan tertib administrasi kependudukan melalui Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) melalui kegiatan Pembentukan Kampung Tertib Adminduk.

### **3.3. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 91,23%. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 68,30%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 22,93%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 1.960.932.550 ( 38,48%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program Pelayanan Pencatatan Sipil di sasaran 440.197.658 (8,64%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	97,38%	92,79 %	95,29%	5.096.585.000	4.665.791.357	91,54
<b>Jumlah</b>						5.096.585.000	4.665.791.357	91,54
<b>Total BelanjaLangsung</b>						5.096.585.000	4.665.791.357	91,54

Dari table di atas diketahui bahwa untuk mencapai tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 95,29% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.665.791.357,- dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.096.585.000,- atau terjadi penghematan sebesar Rp. 430.793.643,-

Tabel 3.11 Analisis efisiensi

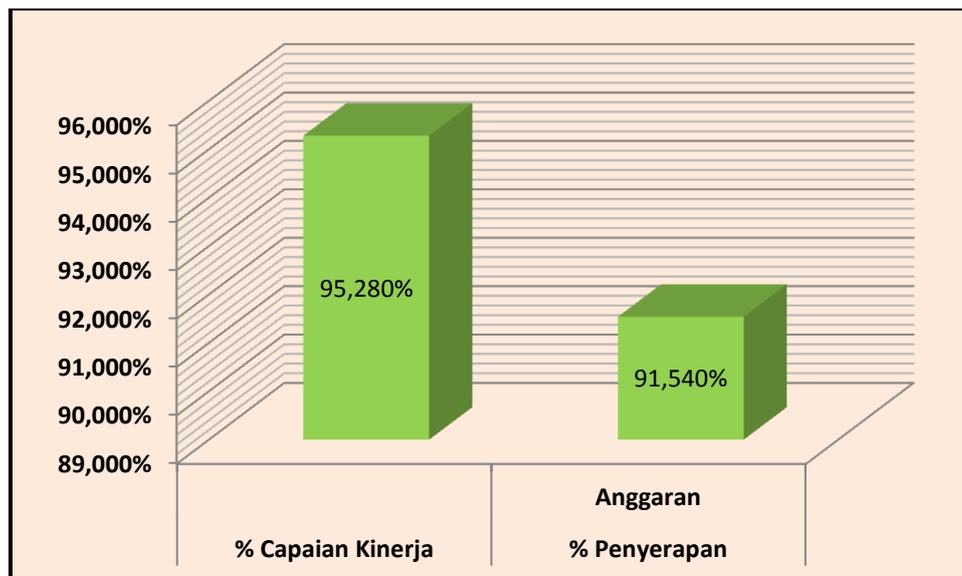
No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	95,28%	91,54	3,73%

Dari table di atas diketahui bahwa untuk mencapai tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 95,29% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya menggunakan anggaran sebesar 91,54% dari pagu anggaran yang disediakan artinya tingkat efisiensi mencapai 3,73%

#### Analisis Efisiensi

Dari Sasaran strategis Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat meskipun tidak tercapai 100 % namun terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Bila capaian kinerja optimal diasumsikan berbanding lurus dengan penggunaan anggaran yang disediakan maka dengan capaian kinerja 95,28% dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 4.856.026.188,- Realisasi penggunaan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 4.649.361.633 atau 91,23 menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp. 206.664.553,- atau sebesar 4,05%



Gambar 3.1. Persentase Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

### 3.4 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2019 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menginisiasi beberapa inovasi yang dilaksanakan dengan :

#### 1. Inovasi dengan Pola Pendekatan pelayanan

- a. Pelayanan selesai di 14 kecamatan untuk pengurusan seluruh dokumen kependudukan yaitu pelayanan KK, KIA, KTP El dan pindah penduduk dalam kota Yogyakarta dapat dilaksanakan di 14 kecamatan bahkan masyarakat dapat memilih untuk mendapatkan pelayanan di kecamatan manapun yang terdekat walaupun bukan di wilayah domisilinya.
- b. Jemput bola dan pelayanan keliling  
 Pada hari-hari tertentu dilakukan kegiatan pelayanan jemput bola pelayanan Kartu Penduduk dan KTP El. Jemput bola dilaksanakan di Kelurahan, Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan, Panti, Pondok pesantren, Tempat Publik seperti Saint Centre “Taman Pintar”, Malioboro Mall dan Lippo Mall



Gambar 3.2 Kegiatan Jemput Bola

Pendekatan pelayanan rekam KTP Elektronik melalui pelayanan E-mobile bagi penduduk yang mengalami keterbatasan fisik dan mental seperti lanjut usia, sakit, difabel dan sakit jiwa.





Gambar 3.3 Perekam KTP El Penduduk yang Mengalami Keterbatasan Fisik door to door

Pelayanan dengan mobil keliling dilaksanakan untuk mencetak KIA Nasional di sekolah-sekolah



Gambar 3.4 Kegiatan Jemput Bola KIA berdampak pada meningkatnya pembuatan Akta Kelahiran

c. Jemput bola pada event-event khusus



**RoTapem Jogja**

# PELAYANAN TERPADU

## PEREKAMAN & PENCETAKAN KTP-e

BANGSAL WIYATA PRAJA, KEPATIHAN, YOGYAKARTA

**REGISTRASI**  
PENDAFTARAN DILAKUKAN ONLINE PALING LAMBAT 1 JAM SEBELUM PELAYANAN BERAKHIR  
[WWW.GISA.JOG.JAPROV.GO.ID](http://WWW.GISA.JOG.JAPROV.GO.ID)

**GRATIS!!!**  
**22-23 OKTOBER // 2019 //**  
09.00 WIB - 15.00 WIB  
(PENDAFTARAN ONLINE DITUTUP PUKUL 14.00 WIB)  
KUOTA TERBATAS

**DALAM RANGKA SUNI PAPEMUDA**  
2019/2020/2021

**SYARAT PEREKAMAN**  
1. BELUM PERNAH REKAM  
2. USIA MINIMAL 17 TAHUN  
3. FOTOKOPI KARTU KELUARGA

**CETAK // RUSAK // HILANG**  
1. SURAT KETERANGAN DARI DUKCAPIL (ASLI)  
2. FOTOKOPI KARTU KELUARGA

**PRIORITAS**  
1. KTP PEMULA  
2. SUKET (Surat Keterangan)

**HARAP DIPERHATIKAN**  
1. Pendaftaran permohonan wajib dilakukan secara online (Baca ketentuan sebelum mendaftar);  
2. TIDAK MELAYANI pencetakan KTP-e karena perubahan data, Penggantian KTP HILANG/RUSAK tanpa Surat Keterangan (SUKET) ASLI dari Pejabat yang Berwenang;  
3. Khusus bagi penduduk luar DIY, disarankan menghubungi petugas untuk cek status kependudukannya sebelum mengisi formulir online;

© birotapemsekdadiy/  
© www.kependudukan.jogjaprov.go.id  
© www.birotapem.jogjaprov.go.id

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

# FESTIVAL ANGRINGAN

**GRATIS!**

PANGGUNG MUSIK, DIALOG PUBLIK, FLASHMOB BEKSAN WANARA, PELAYANAN PUBLIK

Pekan Pelayanan Publik Ombudsman RI Di. Yogyakarta #JogjaOrangYamah

**PELAYANAN PUBLIK ON THE SPOT**  
- OMBUDSMAN RI PERWAKILAN DIY  
- DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN DIY  
- DINAS KESEHATAN DIY  
- POLRESTA YOGYAKARTA  
- DISDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA  
- BPJS KESEJAHTERAAN CAB. DIY

**TUKAR SAMPAH ANDA**  
DENGAN KUPON ANGRINGAN, WEDANG RONDE & PEMERIKSAAN KESEHATAN  
KRITERIA : SAMPAH KERING  
- KERTAS / KARDUS MAKANAN  
- BOTOL / GELAS PLASTIK  
- KALENG MINUMAN

**BANK SAMPAH & KOMUNITAS**  
BANK SAMPAH HANDAYANI  
PROJECT 8 INDONESIA  
YOGYAKARTA GREEN & CLEAN  
GARUK SAMPAH  
KOMUNITAS SAHABAT OMBUDSMAN

PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA FOTO & VIDEO PELAYANAN PUBLIK SPOKIMBARAYAMAH

Contact Person:  
Tiffany - 0812 2677 4539  
ORI DIY - 0811 2500 88

Organized by: Media Partner  
**JogjaPro** **Harian Jogja**

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019  
**19.00 - 21.00**  
MALL MALIOBORO YOGYAKARTA



Gambar 3.5 Jemput bola pada event event khusus di Kantor Gubernur, Malioboro Mall, Lippo Mall, Penyerahan 1000 akta di wilayah

## 2. Inovasi dengan Pola Pelayanan Paket/Terpadu

### a. Pelayanan 3 in 1 akte Kelahiran di Rumah Sakit/Faskes lainnya

Paket pelayanan ini meliputi akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diserahkan di Rumah Sakit Mitra yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Dokumen diserahkan ibu selesai melahirkan, dengan demikian masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan anggota keluarga yang baru dilahirkan



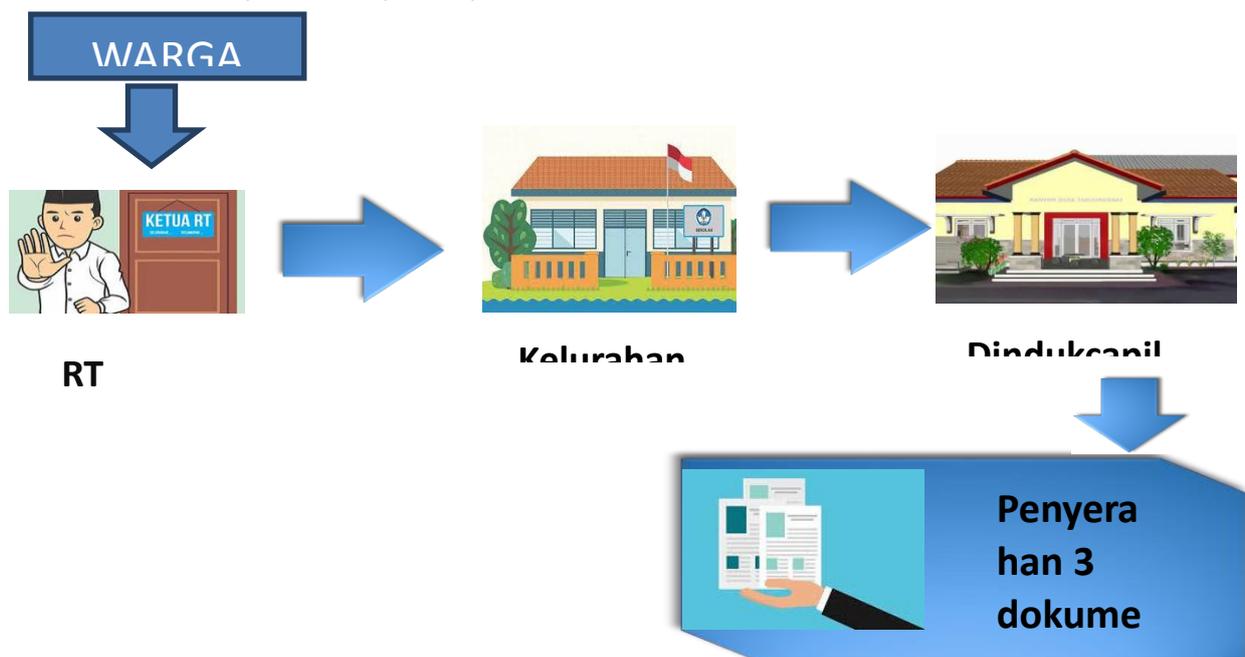
Gambar 3.6 Proses Layanan 3 in 1 di Rumah sakit Mitra

Terdapat 14 (empat belas) RS Mitra yang telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### b. Pelayanan percepatan paket layanan 3 in 1 akte kematian

Paket pelayanan ini meliputi akta kematian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP El.

Pelayanan ini di tahun 2019 merupakan program rintisan dilaksanakan di beberapa kelurahan. Melalui program ini akte kematian dicetak dengan cepat rata-rata dalam 1 (satu) hari dan diserahkan pada saat upacara pemakaman.



Gambar 3.7 Proses Layanan 3 in 1 Akte Kematian

### 3. Inovasi dengan pola layanan berbasis on line

#### a. Pelayanan berbasis Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkan tanda tangan elektronik untuk 9 (sembilan) dokumen kependudukan, yaitu :

- Dokumen Kartu Keluarga,
- Akte Kelahiran,
- Akta Kematian,
- Akte Perkawinan
- Akta Perceraian
- Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI (SKPWN)
- Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN)
- Register Akta Kelahiran
- Register Akta Kematian

#### b. Pelayanan On Line Adminduk

**Sekilas Layanan Adminduk On Line**

- Merupakan pelayanan on line bagi penduduk ber KTP Kota Yogyakarta untuk pengurusan dokumen kependudukan (adminduk).
- Jenis dokumen adminduk yang dilayani secara on line :
  - Pembuatan akta kelahiran,
  - Pembuatan akta kematian,
  - Pembuatan akta perkawinan,
  - Pembuatan akta perceraian
  - Pembuatan surat keterangan pindah penduduk.
  - Download formulir permohonan
- Melalui sistem layanan on line ini masyarakat dapat melakukan proses pendaftaran pelayanan adminduk di manapun berada asal terhubung ke internet.
- Sistem ini merupakan alternatif pelayanan yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk memberikan kemudahan, kecepatan dalam mengakses layanan adminduk.

**MEKANISME – PELAYANAN ADMINDUK ON LINE**

Step 1	Step 2	Step 3
<b>PENDAFTARAN ON LINE</b>	<b>DEMEDIKSAAN BERKAS ON LINE OLEH PETUGAS</b>	<b>PENYERAHAN DOKUMEN KEPADA PEMOHON</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan registrasi.</li><li>2. Setelah registrasi diterima silakan pilih menu layanan dan mengisi formulir permohonan.</li><li>3. Masukkan kelengkapan berkas persyaratan dan kirim secara digital pada menu yang tersedia.</li><li>4. Mengisi form permohonan pelayanan sesuai pilihan secara on line.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setelah pendaftaran dan berkas persyaratan diterima secara on line oleh petugas akan dilakukan pemeriksaan.</li><li>2. Jika data dan berkas lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut.</li><li>3. Bila data dan berkas tidak lengkap dan tidak benar maka akan ada pemberitahuan untuk memperbaiki.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen adminduk diterbitkan dan disyahkan.</li><li>2. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membawa berkas persyaratan yang telah dikirim secara on line.</li><li>3. Penyerahan dokumen adminduk kepada pemohon</li></ol>

<https://sipakota.simda.net>

Gambar 3.8 Layanan On Line Adminduk

Kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui layanan on line ini masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi berbasis web dan mengirimkan semua berkas permohonan secara digital. Pada saat dokumen telah selesai dicetak maka masyarakat akan mendapatkan notifikasi bahwa dokumen telah dapat diambil.

#### c. Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Melalui *Jogja Smart Service* (JSS)

Masyarakat yang akan menggunakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat mengakses melalui aplikasi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui *Jogja Smart Service* (JSS) pada menu Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan yang dapat diakses melalui *smart phone*.



## Layanan Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan

## Informasi Kependudukan

Gambar 3.9 Layanan Administrasi Kependudukan di *Jogja Smart Service*

#### 4. Pembentukan Kampung Tertib Adminduk

Melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) maka dibentuk kader GISA di kampung-kampung untuk mendorong terbentuknya Kampung-kampung Tertib Adminduk di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019 melalui serangkaian kegiatan telah dicanangkan kampung tertib adminduk di Kota Yogyakarta.



Gambar 3.10 Penyerahan penghargaan Kampung Terib Administrasi Kependudukan

## 5. Sosialisasi dengan berbagi media elektronik dan non elektronik

Untuk mendukung berbagai inovasi dilakukan berbagai sosialisasi melalui media elektronik dan non elektronik antara lain :

Berbagai leaflet disebarakan melalui Whats App



Gambar 3.11 Pengumuman Pelayanan Publik

Pola pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi dan internet juga dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat. Pelayanan dalam jaringan (daring) yang dilaksanakan antara lain :

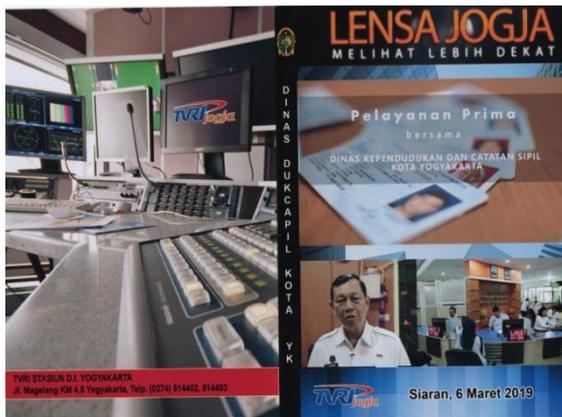
Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas data layanan sehingga pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berjalan dengan lancar karena di dukung database yang berkualitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Kementerian Agama untuk perubahan biodata penduduk akibat perkawinan dan putusan pengadilan lainnya yang bersampak pada perubahan biodata penduduk.

Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan prosedur, mekanisme dan manfaat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Materi Sosialisasi mencakup:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kepemilikan Kartu Keluarga, KTP El, akte kelahiran, dan akta kematian.
- Sosialisasi Peraturan perundangan terbaru diantaranya berlakunya Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) atas Kebenaran Kelahiran dan atau Kebenaran Perkawinan Orang Tua. SPTJM

ini sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki dokumen kelahiran dan perkawinan orang tua untuk tetap dapat memiliki akta kelahiran.

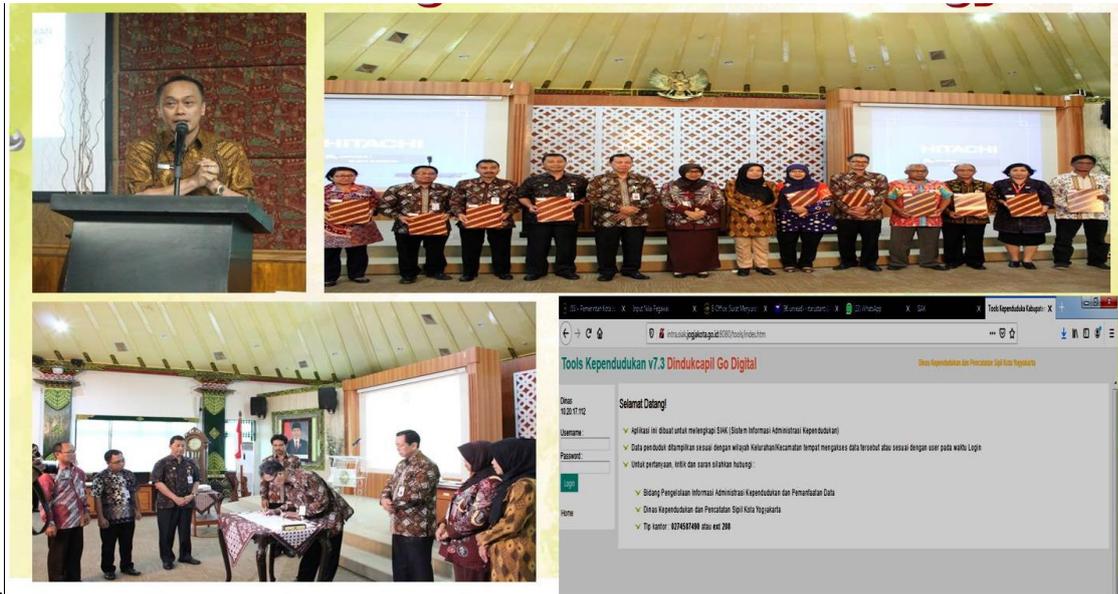
- Sosialisasi Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan tentang perlunya ketetapan pengadilan untuk pengurusan akte kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (sat) tahun. Ketentuan ini sangat memudahkan bagi masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat atas persyaratan dan mekanisme pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil



Gambar 3.12 Sosialisasi di Mediaia Elektronik

Selain inovasi yang berdampak langsung pada capain kinerja, maka sesuai ketentuan yang berlaku data kependudukan juga di Kota Yogyakarta telah digunakan dalam : pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi; dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.”

Sebagai landasan hukum pemanfaatan data pada tahun 2019 telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 50 OPD, 32 unit kerja/kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta



Gambar 3.12 Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Dari upaya ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat penghargaan di Tingkat Provinsi dan Nasional antara lain :

- **ROLE MODEL** Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB tingkat Nasional Tahun 2019. Penghargaan ini telah diterima selama 4 (empat) tahun berturut turut sejak tahun 2016.

## BAB 4

# PENUTUP

### *Bab 4 Berisi :*

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

#### **4.1. Kesimpulan**

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ke..... dari Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 1 sasaran, dengan 1 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2019 indikator yang ditetapkan belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 95,28%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.

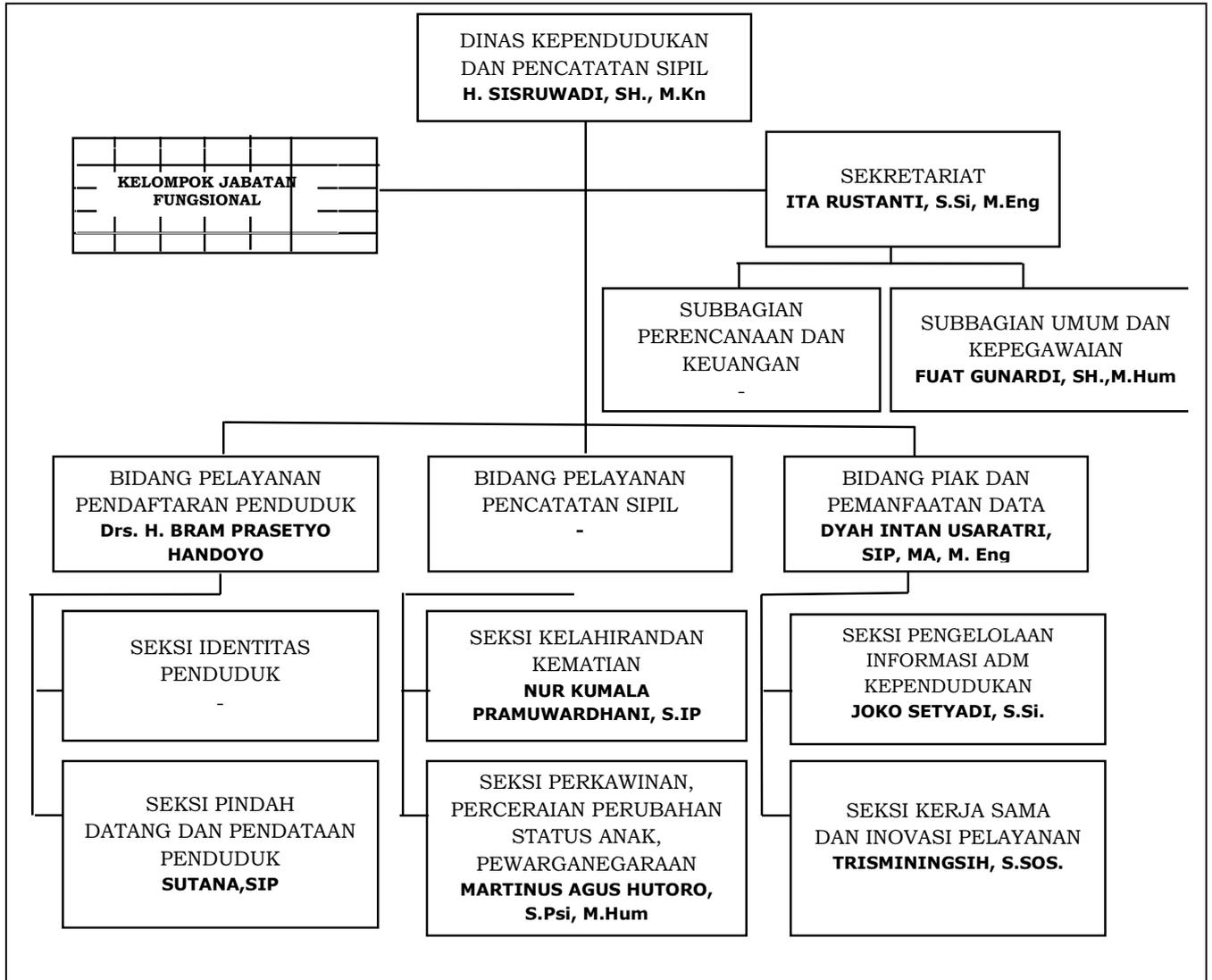
#### **4.2. Rencana Tindakan Lanjut**

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- Menciptakan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan stakeholder lainnya secara lebih luas baik secara langsung maupun tidak langsung seperti kader dermatif GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), RT/RW, Kelurahan, Pengadilan Negeri dll
- Meningkatkan kecepatan pelayanan, penyederhanaan birokrasi dan pendekatan pelayanan untuk meningkatkan animo masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan.
- Penerbitan dokumen kependudukan tanpa menunggu pelaporan yang bersangkutan, melalui pelayanan paket dan terpadu melalui :
  - Pelayanan pindah penduduk masuk sekaligus pelayanan rekam KTP el, penerbitan KIA dan Akta Kelahiran
  - Pelayanan 3 in 1 akta perkawinan penerbitan KK, KTP-el di KUA dan Gereja
  - Pelayanan paket 3 in 1 akta kematian, KK, KTP El di Rumah Sakit dan faskes lainnya dan 45 kelurahan
- Memperluas pelayanan di ruang publik seperti pusat perbelanjaan dan ruang public lainnya.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi



Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)  
TERLAMPIR

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019  
TERLAMPIR

Lampiran 4 Pengukuran Kinerja

Lampiran r. Rencana Aksi



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 514448, 515865, 515866, 562682 E MAIL:  
dukcapil@jogjakota.go.id. HOT LINE SMS: 08122780001 E MAIL: upik@jogjakota.go.id WEB  
SITE: www.jogjakota.go.id

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Mengkoordinasikan pengusulan perubahan indikator kinerja sasaran sehingga dapat menggambarkan kinerja seluruh seksi yang ada di Dinas	Sudah dilaksanakan, disarankan untuk pengajuan perubahan pada awal tahun 2020
2	Memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran dan PPKom untuk menyertakan bukti belanja sesuai ketentuan yang berlaku	Sudah dilaksanakan
3	Dalam melaksanakan pembahasan anggaran bersama dengan Tim Anggaran didokumentasikan secara tertulis	Sudah dilaksanakan di sebagian pembahasan

**Kepala**

TTD

**H. SISRUWADI, SH. M.Kn**  
**NIP. 19620204 198903 1 020**

## Lampiran 7 Penghargaan yang pernah diterima

- ❑ **ROLE MODEL Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB tingkat Nasional Tahun 2019 Kategori Sangat baik (Penghargaan ke 4 sejak tahun 2016)**



- ❑ **Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019**

